



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS PRIYONO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **56890**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.126.626.635

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/125 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 85 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 12.750.000
3. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 13.650.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/130 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 1425 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah Seluas 1.26 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 133.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 782.226.635
9. Tanah Seluas 70000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 659.300.000



1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 372.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 32.180.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.360.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 198.200.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX ABS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.560.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	32.925.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.073.070.190
F. HARTA LAINNYA	Rp.	130.000.000
Sub Total	Rp.	5.021.921.825
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.021.921.825

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.